

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainul Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Charles Simabura, 2024, *Peraturan Menteri dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan UUD NRI 1945*, Rajawali Pers, Depok
- Eko Hariyanto, *Et. All*, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok
- Fakhurohman, 2024, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung
- Hasan Zaini, 1974, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung
- Hans Kelsan, 2019, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Jakarta
- I Gede Yusa, 2016, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Pers, Malang
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta
- _____, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Konstitusi Press, Jakarta
- Junaidi, 2024, *Problematika Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Rajawali Pers, Depok
- Lalu Husni, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *“Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan”*, Kanisius, Yogyakarta

Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
Rio Christiawan, 2021, *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*, Bumi Aksara, Jakarta.
Safa'at, M. A., Ekatjahjana, W., Fatmawati., Saifuddin., & Amsari, F., 2011, *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Soimin, dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta

Surya Tjandra, 2006, *Makin Terang Bagi Kami: Belajar Hukum Perburuhan*, TURC, Jakarta

Widodo, 2021, *Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Makalah disampaikan kepada Indonesian Parliamentary Center (IPC) sebagai bahan untuk penyusunan "Policy Brief" yang akan disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, Indonesian Parliamentary Center (IPC), Jakarta.

Zainal Aslikin, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

C. Jurnal

Afina Charolin Alisya Jeane dan Putri Kemala Dewi Lubis, 2024, “Kontribusi Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional: Analisis Dan Strategi”, *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, Vol. 1, No. 2, 2024

Agus Darmawan, 2020, “Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia”, *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1, No. 1, 2020

Aisyah Nurhalizah, 2025, “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 pada Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Cipta Kerja*”, *Van Java Law Journal*, Vol. 2, No. 01, 2025

Alvendi Ferdinand Christo Lasut, 2023, “*Kajian Terhadap Tugas Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*”, *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 4, 2023

Antoni Putra, 2020, “*Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No.1 2020

Bayu Dwi Anggono, 2020, “*Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 1, 2020

Cipto Kuncoro, 2023, “*Metode Omnibus dalam Pembentukan Undang-Undang Paasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*”, *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 7, No. 1, 2023

Damairia Engelina Nababan, 2025, “*Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Alih Daya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023*,” *Jurnal AJSH*, Vol. 1 No. 1, 2025

- Delfina Gusman, 2023, "*Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah sebagai Perwujudan Demokrasi Substantif*," UNES Law Review, Vol. 5, No. 3, 2023
- Delfina Gusman, 2021, "*Moralitas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Hukum Masyarakat*," Nagari Law Review, Vol. 4, No. 2, 2021
- Delfina Gusman, 2011, "*Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*", Jurnal MMH, Vol. 40, No. 3, 2011.
- Denok Oktawila, dkk., 2025, "*Implikasi Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 Terhadap Regulasi Ketenagakerjaan Berdasar UU Nomor 6 Tahun 2023*," Jurnal Media Informatika (JUMIN), Vol. 6 No. 3, 2025
- Diva Sharni Munali, Et. Al., "*Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya*", Amsir Law Journal, Vol. 5, No.1, 2023
- Fadzlun Budi Sulisty Nugroho, 2019, "*Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*", Gorontalo Law Review, Vol. 2, No. 2, 2019
- Fajar Kurniawan, 2020, "*Problematisa Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK*", Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5, No.1, 2020
- I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya, dkk, 2024, "*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap PKWT*", Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 1, 2024
- Krista Yitawati, 2024, "*Problematisa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Dalam Memberikan Perlindungan Dan Kesejahteraan Pekerja*". Jurnal Rechtsens, Vol. 13 No. 1.

- Krista Yitawati, Meirza Aulia Chairani, dan Angga Pramodya Pradana, 2024, "Problematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 1, No. 2, 2024
- Laurensius Arliman S, 2024, "Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia", *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2024
- Mawardi Khari dan Sulaiman, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Harian Lepas", *Borneo Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2019
- Muhamad Yosi Agustian, dkk., 2023, "Implementasi Omnibus Law dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia", *Lex Stricta*, Vol. 2 No. 2, 2023
- Nurul Amaliah Afrida dan Lukman Hakim Habibulloh, 2023, "Urgensi Pemenuhan Hak Warga Negara Menurut Perspektif Welfare State Di Indonesia", *Journal of Administrative and Social Science*, Vol. 4, No. 1, 2023
- Oki Wahyu Budianto, 2017, "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 3, 2017
- Probo Pribadi S.M., 2025, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja," *Milthree Law Journal*, Vol. 2 No. 2, 2025.
- Rahmat Bagaskara Hidayat dan Maria Madalina, 2024, "Analisis Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah", *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 3, 2024
- Rusyiana, dkk., 2025, "Analisis Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023: Implikasi Terhadap Perlindungan Hak Pekerja di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11 No. 7. 2025
- Saibun Kasmadi Sirait, Fransiska Riana Siregar, dan Ani Wijayati, 2025, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023: Implikasi Terhadap Pengaturan Ketenagakerjaan di Indonesia," *Jurnal Prisma Hukum*, Vol. 9 No. 4, 2025

Sakti Lazuardi Ahmad Ulil and Ditta Chandra Putri, 2020, “Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, 2020

Salma Elsa Anindya dan Ratih Damayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Pekerja Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi”, Jurnal Daarul Huda, Vol. 2, No. 4, 2024

Siahaan, M., 2009, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum konstitusi”, Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 3, 2009

Soeroso, F. L., 2013, “Pembangkitan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Hukum, Vol. 6, No.3, 2013

Yoel Edward Hasugian, 2025, “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap Upah Minimum Sektoral di Sumatera Utara,*” *Neoclassical Legal Review*, Vol. 4 No. 2

D. Internet dan Sumber Lainnya

Hukumku, “*Concurring Opinion dalam Pengadilan: Apa Itu dan Bagaimana Dampaknya?*”, <https://www.hukumku.id/post/concurring-opinion-dalam-pengadilan-apa-itu-dan-bagaimana-dampaknya#:~:text=Concurring%20opinion%20dalam%20putusan%20pengadilan%20merupakan%20pendapat,dan%20alasan%20hukum%20berbeda%20dari%20mayoritas%20hakim.>

Hukum Online, “*Memahami Praktik Terbaik bagi Perusahaan dan Pekerja dalam Implementasi Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 pada UU Cipta Kerja*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-praktik-terbaik-bagi-perusahaan-dan-pekerja-dalam-implementasi-putusan-mk-no168-puu-xxi-2023-pada-uu-cipta-kerja-lt6745bf2308b86/>.

Humas MKRI, "Kabulkan Sebagian, MK Minta UU Ketenagakerjaan Dipisahkan dari UU Cipta Kerja", <https://www.mkri.id/berita/kabulkan-sebagian,-mk-minta-uu-ketenagakerjaan-dipisahkan-dari-uu-ciata-kerja-21782>.

